Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara

Willem Cahyadi Halawa¹, Haposan Siallagan²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

e-mail: willemcahyadi.halawa@student.uhn.ac.id¹, haposansiallagan@uhn.ac.id²

Abstrak

Otonomi daerah merupakan konsep penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia, yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang responsif oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta peran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam merumuskan regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara telah berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip otonomi daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Namun tidak dapat pula dipungkiri masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas peraturan daerah dalam mendukung otonomi daerah serta peran DPRD dalam merumuskan Perda yang mendukung otonomi daerah tercermin melalui upaya penyusunan regulasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat, dinamika pembangunan daerah, dan semangat kemandirian lokal.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah, Sumatera Utara*

Abstract

Regional autonomy is an important concept in the decentralized government system in Indonesia, which gives wider authority to local governments to regulate and manage their own government affairs. This research aims to analyze the mechanism of the formation of responsive local regulations by the DPRD of North Sumatra Province in supporting the implementation of regional autonomy and the role of the DPRD of North Sumatra Province in formulating regulations that are in line with the principles of regional autonomy. The research method used includes a normative juridical approach by analyzing the relevant laws and regulations. The results show that the process of forming local regulations in the DPRD of North Sumatra Province has attempted to fulfill the principles of regional autonomy by referring to laws and regulations starting from the planning, preparation, discussion, determination, promulgation and dissemination stages. However, it cannot be denied that there are still some obstacles that need to be overcome to improve the responsiveness and effectiveness of local regulations in supporting regional autonomy and the role of DPRD in formulating local regulations that support regional autonomy is reflected through efforts to formulate regulations that take into account the interests of the community, the dynamics of regional development, and the spirit of local independence.

Keywords : *Regional Autonomy, Formation Of Regional Regulations, North Sumatra*

PENDAHULUAN

Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu paradigma fundamental dalam transformasi sistem pemerintahan pasca reformasi tahun 1998, yang secara substantif mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah. Namun guna kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dilakukan perubahan beberapa ketentuan Pasal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Fartini, 2022). Dimana peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan desentralisasi yang lebih bermakna dan demokratis. Konsep ini bertujuan memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi dan keunggulan lokalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan otonomi daerah, setiap pemerintahan daerah seperti rumah tangga sendiri ini berarti menetapkan kebijakan pembangunan, mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan, dan memilih pemimpin (Sudarsono, 2022).

Implementasi otonomi daerah memiliki tiga dimensi utama yaitu *pertama*, pengakuan terhadap keragaman daerah, *kedua*, pemberdayaan masyarakat lokal, dan *ketiga*, peningkatan daya saing kompetitif wilayah (Syaukani, 2002). Hans Antlov berpendapat bahwa dalam negara kesatuan baik sentralistik maupun desentralistik, daerah atau organ institusi diberi hak otonom oleh pemerintah pusat. Hak otonom ini dapat ditarik dari kewenangan dan peraturan perundang-undangan tingkat daerah tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari daerah (Suharizal, 2012). Dalam konteks ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam membentuk peraturan daerah (Perda) yang responsif dan bermakna. Dalam negara dengan prinsip sentralisasi ekstrim hanya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dan seluruh pekerjaan pemerintah dilakukan oleh pusan. Prinsip-prinsip seperti itu sangat jarang diterapkan di negara yang hanya memiliki sedikit penduduk. Pada saat ini, prinsip sentralisasi telah dilakukan perubahan oleh prinsip desentralisasi, yang menunjukkan bahwa kekuasaan diserahkan ke pemerintah pusat. Tidak hanya otoritas regional melemah, tetapi asas desentralisasi kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah untuk menjamin otonomi daerah juga berlaku (Lestari, 2024).

Definisi otonomi daerah yang dikemukakan oleh Fernandez memberikan pemahaman bahwa adanya pemberian hak, tugas serta kewajiban terhadap daerah yang memungkinkan untuk daerah terkait mampu mengatasi dan menjalankan yang menjadi wilayah kewenangannya demi mewujudkan daya guna serta hasil guna dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Salam, 2022). Dengan demikian, adanya tiga tujuan utama seperti politik, administratif, dan ekonomi yang melandasi gagasan tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia (Nuradhwari, 2021). Adapun tujuan politik ialah peningkatan demokrasi dan tujuan administratif adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta tujuan ekonomi dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sebagai bukti peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Iswanto, 2015).

Walaupun otonomi daerah memiliki tujuan yang baik, namun prosesnya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan dan masih menghadapi banyak kendala atau faktor yang menghambat. Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk pengelolaan sumber daya yang tidak setara di tingkat daerah, konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan kekurangan sumber daya manusia dan keuangan di tingkat daerah (Alqarni, 2021). Dengan hadirnya konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang merupakan tantangan yang signifikan, harus dipahami dari perspektif hukum (Ridwan, 2021).

Sebagai bagian dari masyarakat hukum, daerah memiliki otoritas otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sesuai dengan keinginan dan kepentingan kelompoknya sendiri selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan kepentingan umum (Marwan, 2019). Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu wilayah dengan kompleksitas sosial dan kultural yang tinggi, menghadapi tantangan signifikan dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas legislasi daerah sangat bergantung pada kemampuan DPRD dalam merumuskan kebijakan yang substantif dan kontekstual. Provinsi Sumatera Utara, dengan keragaman etnis, budaya, dan potensi sumber daya alamnya, menjadi representasi kompleksitas

tantangan implementasi otonomi daerah di Indonesia. Wilayah ini memiliki karakteristik unik yang menuntut pendekatan legislasi yang responsif dan adaptif. Keberagaman masyarakat Sumatera Utara, yang terdiri dari berbagai suku seperti Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan lainnya, menciptakan dinamika sosial yang memerlukan regulasi yang komprehensif dan inklusif.

Dalam konteks implementasi otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara menghadapi tantangan signifikan dalam membentuk peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh elemen masyarakat. Proses legislasi tidak lagi sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Realitas empiris menunjukkan bahwa kualitas peraturan daerah masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa permasalahan mendasar yang kerap muncul antara lain:

1. Keterbatasan kapasitas legislator dalam memahami kompleksitas persoalan daerah
2. Lemahnya mekanisme partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan daerah
3. Intervensi kepentingan politik praktis yang dapat mendistorsi substansi regulasi
4. Ketidaksielarasan antara peraturan daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat

Secara teoritis, pembentukan peraturan daerah yang responsif mensyaratkan pendekatan multidimensional. Hal ini tidak sekadar soal teknis legislasi, melainkan kemampuan DPRD untuk mentransformasikan aspirasi masyarakat ke dalam produk hukum yang bermakna. Konsep responsivitas dalam konteks ini mencakup kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial, representasi kepentingan seluruh kelompok masyarakat, akuntabilitas publik dalam proses pembentukan peraturan, serta kejelasan tujuan dan manfaat regulasi bagi masyarakat.

Peraturan Daerah (Perda) digunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia untuk menjalankan pemerintahan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, Perda berfungsi sebagai alat untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah karena otonomi daerah bukan merupakan kebebasan pemerintahan yang merdeka (Joisen, 2022).

Provinsi Sumatera Utara, dengan kompleksitas sosial-politiknya, menjadi laboratorium penting untuk memahami dinamika pembentukan peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Wilayah ini memiliki sejarah panjang pergulatan identitas dan kepentingan yang membutuhkan regulasi responsif. Tantangan geografis Sumatera Utara turut memengaruhi kompleksitas pembentukan peraturan daerah. Penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah tugas yang sulit. Ini karena Perda akan menjadi alat untuk melaksanakan transformasi sosial dan demokrasi dan konkretisasi warga daerah yang mampu menanggapi perubahan yang cepat serta tantangan pada masa otonom dan global. Saat ini, pembangunan daerah yang baik merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (Sihombing, 2019). Provinsi yang mencakup wilayah pesisir, pegunungan, dan pusat-pusat ekonomi memerlukan pendekatan legislasi yang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik wilayah. Kebutuhan pembangunan di kawasan pantai berbeda dengan kawasan perkebunan atau perkotaan, sehingga peraturan daerah dituntut untuk bersifat kontekstual dan adaptif.

Dimensi ekonomi juga menjadi pertimbangan kritis. Sumatera Utara, dengan potensi perkebunan, pertambangan, dan sektor kreatif, membutuhkan instrumen hukum daerah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peraturan daerah tidak cukup sekadar menjadi produk administratif, melainkan harus menjadi katalis pembangunan. Kompleksitas sosial-kultural, geografis, dan ekonomi Sumatera Utara membuat pembentukan peraturan daerah menjadi proses yang sangat strategis. Tidak sekadar soal teknis legislasi, melainkan upaya komprehensif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, responsif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan PERDA diharapkan dapat melengkapi tugas dan tujuan pemerintah dalam menumbuhkan kepercayaan rakyatnya. Melalui partisipasi masyarakat, aspirasi masyarakat dapat diterima dan dipenuhi, sehingga penyusunan Perda tidak hanya melibatkan legislatif dan eksekutif semata, tetapi juga masyarakat dapat berkontribusi dengan ide-ide mereka untuk menghasilkan Perda (Karyadin, 2023). Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara ketat. Beberapa

proses, seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan, telah ditetapkan secara formal (Yassen, 2023).

Artikel ini berbeda dengan temuan peneliti terdahulu guna memberi gambaran terkait kebaruan dari hasil yang didapatkan. Dimana penelitian sebelumnya dilakukan oleh Muhammad Yasser dan Mirza Nasution, Universitas Sumatera Utara pada tahun 2024 dengan judul Pelaksanaan Fungsi dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dimana penelitian terdahulu mengkaji terkait fungsi dan proses pembentukan Perda serta faktor penghambat yang mempengaruhi proses pembentukan Perda. Sedangkan pada penulisan ini, tidak hanya membahas tentang proses pembentukan Perda, tetapi juga membahas terkait peran daripada DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam hal merumuskan Perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, Penelitian ini sangat penting dilakukan karena diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan sistem pemerintahan daerah (Umam, 2024). Keterbatasan sumber daya, konflik kepentingan, dan ketidaksetaraan antar-daerah masih menjadi tantangan nyata yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan solusi yang tepat (Muhlisin, 2021). Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi atau menjelajahi secara mendalam dinamika pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada aspek responsivitas dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

METODE

Merujuk pada permasalahan yang akan dibahas, adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang merupakan cara penelitian dengan berlandaskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan filosofis. Tujuannya ialah guna memahami dengan cara menganalisis suatu aturan, perundang-undangan serta norma yang telah ditetapkan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini biasanya berupa suatu aturan baru yang diciptakan guna mengatasi hal negatif dari permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berarti melakukan penelitian kepustakaan dengan melihat bahan pustaka yang terkait dengan subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang terjadi (Rosidi, 2024). Dalam penelitian kepustakaan ini, yang dimaksud sebagai sumber bahan hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berfokus pada studi kepustakaan seperti jurnal, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta putusan pengadilan dengan mengkaji asas atau norma hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah?

Otonomi daerah merupakan upaya untuk menciptakan demokratisasi di mana semua aspirasi rakyat dan kepentingan masing-masing daerah dapat dipertimbangkan dengan baik (Huzaeni, 2022). Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara merupakan suatu acuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan Pembentukan Peraturan Daerah, yang dimana dalam situasi tertentu baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat berupaya untuk melahirkan rancangan Perda diluar daripada program pembentukan Perda yang telah ditentukan. Adapun proses pembentukan Perda Provinsi khususnya Sumatera Utara mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Di mana Undang-Undang ini mewajibkan Menteri Dalam Negeri untuk mengawasi Perda Provinsi dan Gubernur untuk melakukan pengawasan prefentif (Mulyani, 2020).

Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi dengan maksud guna melindungi produk atau hasil dari Peraturan Daerah Provinsi agar tetap pada kedaulatan

sistem hukum Indonesia. Perda dirancang untuk melaksanakan pemerintahan desentralisasi dan meliputi kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Selain itu, peraturan daerah dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan publik. Oleh karena itu, diharapkan perda dapat memulai perubahan di suatu wilayah dan mengharmoniskan kepentingan yang berbeda. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan perda selain memberikan otonomi daerah, juga berfungsi sebagai penjelasan secara menyeluruh serta penyongsong dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda provinsi dan kabupaten/kota hanya berlaku untuk wilayah tersebut, dan perda kabupaten/kota hanya berlaku untuk wilayah tersebut. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2019, yang dikatakan sebagai Peraturan daerah provinsi ialah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi disertai dengan persetujuan oleh Gubernur. Pada dasarnya pembentukan Perda disetiap wilayah sama, yaitu tetap mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) khususnya di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

A. Tahap perencanaan (Pasal 32-Pasal 38)

Tahapan perencanaan ini dimulai dengan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan pada Prolegda (Program Legislasi Daerah) Provinsi. Dimana Prolegda tersebut berisikan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur juga harus mencakup latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, dasar pemikiran, objek yang akan diatur, serta arah pengaturan, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dimana keseluruhan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian serta penyelarasan yang tertuang dalam naskah akademik. Penyusunan Prolegda Provinsi dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi yang akan ditetapkan dalam jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda Provinsi.

Adapun penyusunan daftar Raperda Provinsi ditentukan berdasarkan pada perintah peraturan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, aspirasi masyarakat daerah. Di bawah Pemerintah Daerah Provinsi, prolegda provinsi dapat disusun oleh biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal terkait. Prolegda Provinsi dapat memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri dari konsekuensi dari keputusan Mahkamah Agung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi. Gubernur atau DPRD Provinsi dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi dalam situasi berikut: untuk menangani situasi luar biasa, konflik, atau bencana alam, sebagai hasil dari kerja sama dengan pihak lain atau dalam situasi lain yang memastikan bahwa suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biaya.

B. Tahapan Penyusunan (Pasal 56- Pasal 62)

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari Gubernur atau DPRD Provinsi, dimana hal tersebut harus disertai dengan penjelasan, keterangan, dan/atau naskah akademik. Untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja, pencabutan atau perubahan yang hanya terbatas akan mengubah beberapa materi, dan keterangan harus disertakan.

Penyusunan penjelasan adalah langkah pertama dalam penyusunan rancangan perda provinsi. Penjelasan ini harus mencakup paling sedikit ide dan materi yang akan diatur dalam perda provinsi yang disiapkan oleh pemrakarsa. Biro hukum pemerintah daerah provinsi menyusun rencana akademik untuk satuan kerja perangkat daerah provinsi. Rencana ini diselesaikan dalam pertemuan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Dengan mengacu pada prolegda provinsi, gubernur memerintahkan pemrakarsa untuk menyusun rancangan perda provinsi. Tim penyusun terdiri dari gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah terkait, dan perancang peraturan perundang-undangan. Jika diperlukan, tim penyusun dapat mengundang peneliti atau ahli khusus yang dianggap memiliki kemampuan untuk membantu menyusun rancangan perda provinsi.

Peraturan provinsi yang telah diselesaikan diberi paraf yang mengatur tim penyusun dan pemrakarsa. Pemersatuan, pembulatan, dan pementapan gagasan dapat dilakukan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan lembaga tingkat atas dari kementerian bidang hukum. Peraturan harus dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi, dan kemudian diserahkan kepada gubernur oleh sekda.

C. Tahapan Pembahasan (Pasal 75- Pasal 76)

Pada tahapan ini, yang memiliki wewenang dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah provinsi ialah DPRD Provinsi bersamaan dengan Gubernur. Dimana tahapan tersebut dimulai dengan proses-proses pembicaraan yang dilaksanakan pada rapat panitia kelengkapan DPRD Provinsi yang secara khusus menangani dibidang legislasi dan rapat paripurna.

Surat pengantar untuk rancangan perda provinsi dari gubernur disampaikan kepada pimpinan DPRD provinsi, yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran, dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan substansi rancangan perda. Rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD provinsi, yang disampaikan kepada gubernur untuk dibahas. Adapun pembicaraan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan yaitu, pada pembicaraan pertama membahas mengenai rancangan perda, pandangan terhadap rancangan perda serta tanggapan terkait pemandangan umum. Pada pembicaraan kedua membahas mengenai keputusan rapat paripurna didahului dengan laporan dari pimpinan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus, yang berisi pendapat fraksi, hasil diskusi, dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. Pembicaraan diakhiri dengan pendapat akhir gubernur.

D. Tahapan Penetapan (Pasal 78- Pasal 79)

Selanjutnya yaitu pada tahapan penetapan, dimana terhadap Raperda Provinsi yang telah disetujui oleh DPRD Provinsi dan Gubernur maka akan disampaikan kepada Gubernur oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama guna ditetapkannya menjadi Perda Provinsi yang semua disebut Raperda Provinsi.

Dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur, Gubernur menandatangani. Jika tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu tiga puluh hari, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi menjadi tidak sah. Dalam hal keabsahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kalimat pengesahan berbunyi sebagai berikut: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah. Kalimat pengesahan harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum naskah tersebut diumumkan dalam Lembaran Daerah.

E. Tahapan Pengundangan (Pasal 81- Pasal 87)

Dalam hal pengundangannya, Perda Provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah yang dilakukan oleh Sekda, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dan terhadap penjelasan perda provinsi, diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

F. Tahapan Penyebarluasan (Pasal 92- Pasal 94)

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menyebarkan Prolegda sejak penyusunan Prolegda, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah. Tujuan dari penyebaran ini adalah untuk memberikan informasi dan/atau meminta masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan penyebaran Prolegda bersama dengan alat kelengkapan DPRD yang menangani bidang legislasi. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disebarkan oleh alat kelengkapan DPRD, dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur, Bupati, atau Walikota disebarkan oleh Sekretaris Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD bekerja sama untuk menyebarkan Peraturan Daerah Provinsi yang diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Bagaimana peran DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Merumuskan Peraturan Daerah Yang Sesuai dengan Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah?

Dengan memahami bahwa pengertian mendasar dari otonomi merupakan sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan peraturan yang diciptakan dengan sendiri, sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakatnya (Ariyanto, 2020). Yang menjadi pengertian dari daerah otonom ialah bersatunya masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan lokal secara mandiri berdasarkan keinginan masyarakat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia (Muksin, 2021). Otonomi memiliki dua hal yang tercakup secara prinsipil seperti hak dan wewenang guna memanejemeni yang menjadi wilayah tanggungannya serta tanggung jawab terhadap kegagalan dalam menjalankan pemerintahan yang berada di wilayah tanggungannya. Pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Dimana artinya ialah pemerintah daerah sebagai pelaksana yang menjalankan fungsi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Dengan otonomi, daerah diharapkan lebih mandiri dalam memilih apa yang akan mereka lakukan dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengontrol mereka. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan tugasnya untuk menciptakan peluang untuk kemajuan daerah tanpa intervensi dari pihak lain; ini disertai dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat daerah ataupun kepada pemerintah pusat. Dalam hal perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat, adapun yang menjadi beberapa aspek penting untuk dilakukan seperti:

- a. Implementasi Kebijakan Nasional
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan program yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat. Misalnya, program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat harus dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan di daerah selaras dengan tujuan nasional. Ini termasuk koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- c. Pelayanan Publik
Pemerintah daerah menyediakan layanan publik kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
- d. Pengawasan dan Pengendalian
Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Ini untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemberdayaan dan Otonomi
Meskipun pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, mereka juga memiliki otonomi untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Otonomi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lokal.

Dengan demikian, pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program nasional dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Berbicara mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah, prinsip penyerahan otonomi terhadap daerah merupakan prinsip demokrasi, menumbuh kembangkan masyarakat daerah yang menjadi tanggungannya serta meningkatkan pelayanan umum, dengan pemerataan serta keadilan dengan menilik terlebih dahulu keanekaragaman wilayah lokal yang menjadi tanggungannya. Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kebebasan atau diskresi baik dalam hal mengambil suatu kebijakan maupun tindakan ataupun pada pelaksanaan kebijakan atau tindakan itu sendiri yang dianggap baik selagi hal tersebut masih berada pada batas-batas wilayah kewenangannya guna memberdayakan seluruh kemampuan yang ada padanya untuk dikembangkan sehingga

dapat mewujudkan serta menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu tujuan utama UU Otonomi Daerah adalah untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat, mendorong prakarsa dan kreativitas, dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan. Undang-undang ini juga mengubah peran dan fungsi DPRD. Pemerintah daerah diharapkan lebih siap menghadapi paradigma baru. Ketika demokrasi diterapkan, masyarakat akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membuat keputusan sendiri dan mengekspresikan diri secara rasional, yang berarti bahwa kekuasaan negara akan berkurang.

Adapun prinsip-prinsip-prinsip otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diantaranya seperti:

a. Kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab bagi daerah kota/kabupaten

Kewenangan yang luas didefinisikan sebagai kemampuan daerah kabupaten atau kota untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri, yang mencakup kewenangan seluruh bidang pemerintah kecuali beberapa bidang pemerintah yang diawasi pusat. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi adalah semua tanggung jawab yang dimiliki oleh kabupaten atau kota. Dalam undang-undang ini, prinsip otonomi yang seluas-luasnya digunakan. Ini berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Rahim, 2023).

Otonomi yang nyata berarti keleluasaan atau kebebasan daerah dengan mengedepankan tujuan daripada otonomi untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang ada, diperlukan, dan tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah tersebut. Artinya, kewenangan suatu urusan harus berasal dari inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, sehingga otonomi ini dapat bervariasi di setiap daerah berdasarkan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

Dikatakan Otonomi yang bertanggung jawab ialah ketika daerah diberi pemenuhan terhadap hak dan kewenangan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan. Tujuan daripada otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan menjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.

b. Otonomi yang terbatas untuk daerah propinsi

Otonomi provinsi adalah bentuk otonomi yang terbatas. Pemerintah daerah diberi otoritas untuk mengatur dan mengelola urusan nasional secara mandiri, yang dikenal sebagai otonomi daerah. Namun, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, keuangan dan fiskal nasional, dan agama adalah beberapa kewenangan yang tidak diberikan kepada pemerintah daerah. Kewenangan otonomi daerah Indonesia dapat dibatasi oleh berbagai hukum, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Otonomi daerah didorong oleh tiga dasar atau asas yaitu desentralisasi yang berarti pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kepada pemerintah daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal melaksanakan pengurusan terhadap wilayahnya dengan mandiri, dekonsentrasi yang berarti terhadap beberapa urusan pemerintahan yang diberikan kepada gubernur oleh pemerintah pusat karena mereka berfungsi sebagai wakil dari pemerintah pusat, termasuk gubernur dan walikota atau bupati sebagai penanggung jawab atas urusan pemerintahan umum dan tugas pembantuan yang diartikan sebagai penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk menjalankan beberapa urusan pemerintahan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat, atau oleh pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk menjalankan beberapa urusan pemerintahan yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah provinsi.

Salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota adalah membentuk peraturan daerah. Ini dimulai dengan tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Fungsi legislatif telah berubah, memberikan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kewenangan untuk membentuk peraturan

daerah. Oleh karena itu, DPRD seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam pembentukan peraturan daerah daripada eksekutif. DPRD Provinsi dalam hal merumuskan suatu Perda harus berlandaskan pada prinsip-prinsip serta asas-asas daripada otonomi daerah tersebut guna menghindari terjadinya penyimpangan demi mewujudkan keterbukaan atau transparansi, koordinasi, partisipasi serta keterpaduan. Mengingat Perda merupakan suatu produk ciptaan DPRD, sehingga memerlukan persetujuan oleh Kepala Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota yang tertuang pada Pasal 2, dimana DPRD memiliki fungsi sebagai (Amalia, 2021):

- a. Pembentukan Perda
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya sebagai lembaga lokal yang mewakili kepentingan rakyat. Secara umum, legislatif memiliki tiga tugas utama dalam hal mewakili rakyat, mengatur anggaran, memberlakukan undang-undang, dan memantau operasi pemerintah. Sebagai lembaga legislatif, tugas utama DPRD adalah membuat peraturan daerah, yang merupakan produk khas hukum daerah. Dengan melakukan tugas ini, Dewan Perwakilan Daerah menunjukkan pentingnya peraturan daerah. DPRD mengaktualisasikan dirinya sebagai representasi rakyat dengan memasukkan kebutuhan dan tujuan lokal ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD hanya dapat menyampaikan sejumlah kecil aspirasi dan masalah masyarakat melalui undang-undang. Hal ini menyebabkan hipotesis bahwa informasi yang disajikan dalam peraturan dan perundang-undangan lokal akan sangat tidak akurat untuk kepentingan eksekutif. Karena dia pasti akan memilih masalah yang menurutnya penting dari sudut pandang manajemen pemerintahan jika desainnya berasal dari pihak pemerintah (Dachi, 2022).

Menurut hukum, peran utama DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga legislatif adalah menetapkan peraturan daerah. DPRD menunjukkan warna, karakter, dan kualitas secara materil dan fungsional melalui tugas legislatifnya. Tingkat atau kualitas peraturan yang dibuat oleh DPRD menentukan kapasitasnya untuk melaksanakan fungsinya dan memastikan eksistensinya. Dengan melakukan tugas ini, DPRD berfungsi sebagai perwakilan rakyat dan mengubah keinginan dan kebutuhan anggota masyarakat ke dalam kebijakan resmi yang dikenal sebagai peraturan daerah atau biasa disebut Perda. Oleh karena itu, tidak banyak proyek peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan oleh legislator menunjukkan bahwa hanya keinginan individu dan masalah masyarakat yang disampaikan ke parlemen dan dicari solusinya. Karena tanggung jawabnya, DPRD harus memperhatikan pihak eksekutif. Namun, kurang terlihat karena media tidak seperti pusat dalam memberikan informasi tentang pengawasan yang dilakukan DPRD atas tanggung jawabnya untuk mengawasi dan mengawasi anggaran. Selain itu, DPRD harus melakukan kunjungan ke wilayah yang dipilihnya untuk memahami keinginan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Dengan demikian, sebagai perwakilan rakyat yang bertanggung jawab atas eksekutif, DPRD diharapkan dapat melaksanakan tugasnya untuk membantu eksekutif menjalankan pemerintahan setiap hari sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama.

Diharapkan bahwa peran DPRD dalam pengawasan peraturan daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah atau eksekutif dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, bukan untuk "menjegal" atau menjatuhkan mereka yang tidak setuju. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Dewan Perwakilan yang bekerja sama dengan Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan pemerintahan di daerah tersebut. Selain itu, sebagai Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan melaksanakan fungsi legislatifnya dengan membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA) di daerah tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara juga merupakan Dewan Perwakilan yang bekerja sama dengan Gubernur Sumatera Utara untuk melaksanakan program daripada peraturan daerah yang telah dirumuskan (Soetarto, 2020).

Selain itu, dengan diimplementasikannya suatu otonomi daerah dapat menimbulkan peluang kepada pemerintah daerah setempat guna menghadirkan adanya perkembangan di berbagai aspek seperti dibidang kesehatan. Penyelenggaraan kewenangan yang dapat

dilaksanakan pada tingkat daerah diperlukan agar penyelenggaraan kesehatan dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk memindahkan tanggung jawab pemerintahan di bidang kesehatan dari pusat ke daerah otonom agar masyarakat mendapatkan tingkat kesehatan terbaik (Thamrin, 2019).

Guna terciptanya suatu Peraturan Daerah oleh Pemerintah daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip daripada otonomi daerah, maka DPRD dimaksudkan dapat berperan sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. Fungsi Legislasi sesuai Pasal 149 UU N0. 34 Tahun 2014, artinya bahwa DPRD berperan sebagai fungsi legislasi yang berarti mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan Perda bersama dengan kepala daerah. Proses ini melibatkan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian dibahas dan disetujui bersama.
- b. Prinsip Otonomi Daerah, artinya bahwa DPRD harus memegang teguh Prinsip otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. DPRD berperan dalam memastikan bahwa Perda yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sifat kedudukan atau hierarkinya.
- c. Pengawasan dan Akuntabilitas, DPRD juga memiliki peran dalam pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Perda berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja eksekutif daerah dan memastikan adanya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dasarnya, pengawasan berperan serta berfungsi sebagai alat dalam memastikan perencanaan yang telah ditentukan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan demi kepentingan masyarakat serta pemerintah (Sari, 2021).
- d. Partisipasi Masyarakat, artinya bahwa dalam proses pembuatan Perda, DPRD harus melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan responsif.
- e. Efisiensi dan Efektivitas, artinya DPRD berperan dalam memastikan bahwa Perda yang dibuat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mereka harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari peraturan yang akan diterapkan.

Dengan menjalankan peran-peran ini, DPRD Sumatra Utara berkontribusi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Terdapat beberapa contoh konkret mengenai peran DPRD dalam pembuatan Perda di Sumatra Utara yang berlandaskan pada prinsip otonomi daerah seperti:

- a. Perda tentang Pengelolaan Sampah
Dimana dalam hal ini DPRD Sumatra Utara bersama dengan pemerintah daerah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Raperda ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat komisi dan pleno DPRD, yang melibatkan masukan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan ahli lingkungan. Perda ini disusun berdasarkan kebutuhan spesifik daerah Sumatra Utara yang memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Misalnya, daerah perkotaan seperti Medan mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan daerah pedesaan. Adanya Partisipasi Masyarakat Selama proses penyusunan, DPRD mengadakan beberapa sesi dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan dari warga mengenai masalah sampah di lingkungan mereka dan solusi yang diusulkan.
- b. Perda tentang Pengembangan Pariwisata
Dalam hal ini DPRD mengajukan Raperda tentang Pengembangan Pariwisata yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata di Sumatra Utara. Raperda ini dibahas secara mendalam dengan melibatkan stakeholder pariwisata, seperti pengusaha hotel, pemandu wisata, dan komunitas lokal. Perda ini dirancang untuk memanfaatkan potensi wisata lokal, seperti Danau Toba, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan

budaya setempat. Pengawasan dan Akuntabilitas yang dilakukan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Perda ini untuk memastikan bahwa program-program pengembangan pariwisata berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

SIMPULAN

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di DPRD Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. DPRD memiliki peran penting dalam menyusun, membahas, dan mengesahkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Proses ini melibatkan beberapa tahapan utama diantaranya seperti pertama, tahapan perencanaan yaitu identifikasi isu-isu yang perlu diatur melalui Perda, berdasarkan kebutuhan lokal dan masukan dari masyarakat. Kedua, penyusunan pembuatan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang memuat kajian mendalam mengenai isu yang akan diatur. Ketiga, pembahasan diskusi intensif antara DPRD dan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran. Keempat, pengesahan Raperda yang telah disepakati bersama disahkan oleh kepala daerah dan diundangkan agar dapat berlaku efektif. Kelima, Pengundangan dan yang terakhir ialah tahapan penyebarluasan.

Peran DPRD dalam merumuskan Perda yang sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah meliputi fungsi Legislasi dimana DPRD bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan Perda bersama dengan kepala daerah, memastikan bahwa peraturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan lokal, Pengawasan dimana DPRD mengawasi pelaksanaan Perda untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta Partisipasi Masyarakat dimana DPRD melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan Perda untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat, dan akuntabilitas dimana DPRD memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses legislasi, sehingga Perda yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD perlu secara terus menerus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan penyelenggaraan forum-forum diskusi publik. Selain itu, anggota DPRD juga perlu secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka dalam bidang legislasi, agar dapat menyusun Perda yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Sehingga DPRD dapat bekerja sama dengan akademisi dan pakar dalam penyusunan naskah akademik untuk memastikan bahwa Perda yang dibuat didasarkan pada data dan analisis yang komprehensif. Dengan demikian, DPRD perlu melakukan evaluasi berkala terhadap Perda yang telah diundangkan, untuk memastikan bahwa peraturan tersebut masih relevan dan efektif. Jika diperlukan, revisi atau pembaruan Perda dapat dilakukan.

Dengan menjalankan peran dan fungsi ini secara optimal, DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahim, dkk. (2023). Problematika sistem otonomi dalam pemerintahan daerah di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(3), 2354–2360.
- Abd. Umam, dkk. (2024). Landasan hukum dan ketidakadilan dalam otonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(2). <https://doi.org/10.21070/ijins.v25i2.1070>
- Ade Lestari, Lince Magriasti, & Hari Suriadi. (2024). Perjalanan otonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 3(1), 77-91.
- Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, & Ismi Arifiana. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Ariyanto. (2023). Rekonstruksi regulasi penegakan kode etik oleh badan kehormatan DPRD berbasis nilai keadilan. Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

- Azlan Thamrin. (2019). Politik hukum otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di bidang kesehatan. *Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 33-51.
- Basri Mulyani. (2020). Dekonstruksi pengawasan peraturan daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2(1), 91–113.
- Dharma Setyawan Salam. (n.d.). Otonomi daerah dalam perspektif lingkungan, nilai, dan sumber daya. Djembatan.
- Hely Joisen, dkk. (2022). Strategi Bapemperda dalam penyusunan PERDA Hak Inisiatif DPRD No 7 Tahun 2017 tentang insentif tenaga pendidik pada tenaga pendidikan non-formal di bidang keagamaan (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014-2019). *Jurnal Regional Planning*, 4(2), 126–144.
- I. Ridwan & I. R. Sumirat. (2021). Kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter Jawara (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)*, 1(2).
- Karyadin, Azizah. (2023). Peranan masyarakat pada pembentukan peraturan daerah (Perda). *Jurnal Yustitabelen*, 9(1), 97-105.
- Marwan, Andi Risma. (2019). Kedudukan fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah pasca amandemen UUD 1945. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 265–275.
- Mohamad Roky Huzaeni & Nuril Firdausiah. (2022). Inefisiensi peraturan daerah di Indonesia. *Rechtenstudent*, 3(1), 42–55.
- Muhammad Yasser & Mirza Nasution. (2024). Pelaksanaan fungsi dan proses pembentukan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Science and Social Research*, 7(3), 1279-1285.
- Muhlisin, S. & S. (2021). Eksistensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam upaya meningkatkan kinerja dan mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Demak. *Jurnal Suara Keadilan*, 22(2), 201–224.
- M. N. A. W. Alqarni. (2021). *Book Series Demokrasi Dan Otonomi Daerah Volume 1: Dinasti Politik Dan Demokrasi Lokal (Vol. 1)*. Syiah Kuala University Press.
- Muksin. (2021). Prinsip-prinsip otonomi daerah Indonesia perspektif siyasah. Skripsi, Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negeri, Padangsidempuan.
- N.A.M. Sihombing. (2016). Problematika penyusunan program pembentukan peraturan daerah. *Legislasi Indonesia*, 13(3).
- Nur Abda Amalia & Mustafa Kamal Rokan. (2021). Tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8510-8517.
- Nurhaslita Sari, dkk. (2021). Peran DPRK Aceh Utara dalam menjalankan fungsi anggaran. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 148–152.
- R. Nuradhawati. (2019). Dinamika sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(1), 152-170.
- Soetarto, Elisabeth Sitepu. (2020). Fungsi pengawasan DPRD dalam penetapan peraturan daerah APBD di kantor DPRD Sumut. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 51-57.
- Sudarsono, M. Riban Satia, & M. Yusuf. (2022). Implementasi fungsi legislasi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah (Kajian di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah). *Pencerah Publik*, 9(2), 40–49.
- Suharizal. (2012). Demokrasi pemilukada dalam sistem ketatanegaraan RI. *UNPAD Press*.
- Syaukani HR, et.al. (2002). Otonomi daerah dalam negara kesatuan. *Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Thomas Dach. (2022). Evaluasi implementasi peraturan daerah sebagai sebuah hukum dalam rangka meningkatkan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 32–46.
- Y. K. Iswanto. (2015). Akuntabilitas publik dalam proses hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Lex Administratum*, 3(8).